

Inclusive Governance Pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

Wina Hariska Putri¹, Dedi Kusuma Habibie²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia
Email: winahariska29@gmail.com

Kata kunci

*Inclusive
Governance,
Pengelolaan, Sagu*

Abstrak

Sagu merupakan hasil perkebunan terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang berpotensi sebagai sentra budidaya sagu sekaligus sentra konsumsi sagu. Pemerintah telah mengikutsertakan pihak swasta yaitu PT. Nasional Sagu Prima (NSP). Serta masyarakat yang telah mengelola sagu secara turun-temurun. Tujuan penelitian inclusive governance pada pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah untuk mengetahui bagaimana inclusive governance pada pengelolaan sagu dan menganalisis apa saja faktor penghambat inclusive governance pada pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah inclusive governance pada pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana secara maksimal, karena kurangnya transparansi dari pemerintah kepada aktor yang terlibat. Dan juga beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya promosi dari pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keywords

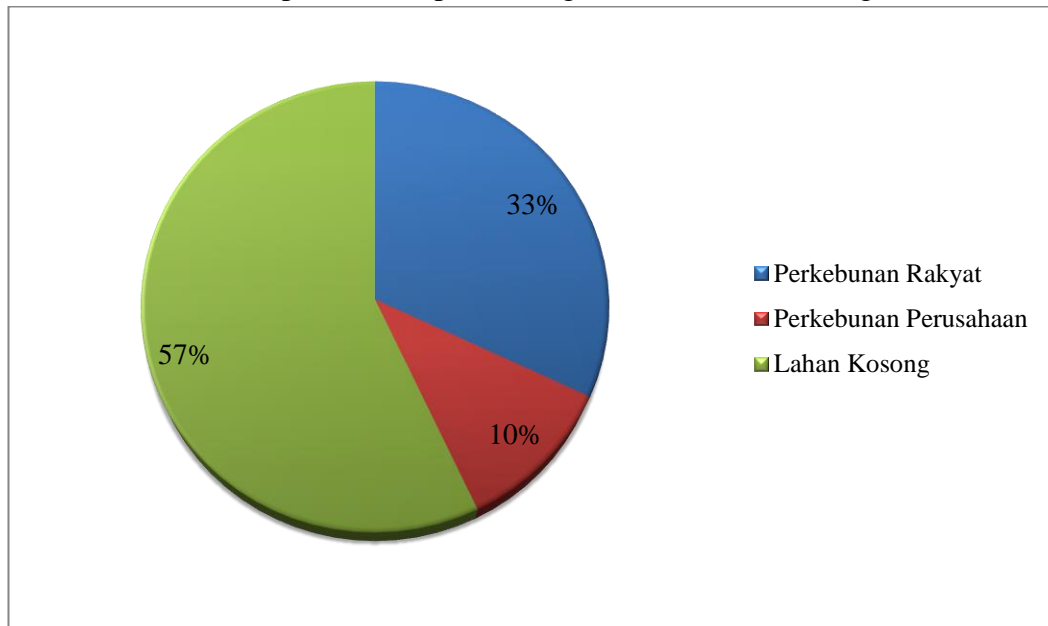
*Inclusive
Governance,
Management, Sago*

Abstract

Sago is the largest plantation product in the Meranti Islands District, which has the potential as a center for sago cultivation as well as a center for sago consumption. The government has included the private sector, namely PT. National Sago Prima (NSP). And people who have managed sago for generations. The purpose of inclusive governance research on sago management in Meranti Islands District is to find out how inclusive governance is in sago management and analyze what are the inhibiting factors for inclusive governance in sago management in Meranti Islands District. In this study using descriptive qualitative research methods, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study are inclusive governance in the management on sago in the Meranti Islands District has not been implemented optimally, because of the lack of transparency from the government to the actors involved. And also some inhibiting factors, namely the lack of promotion from the government and the lack of public awareness of the Meranti Islands District.

Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan inklusif tidak terlepas dari peran aktor pemerintah daerah yang mampu menjadi inisiator dalam membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki (Maftuhin, 2017). Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang berpotensi sebagai sentra budidaya sagu, sekaligus sentra konsumsi sagu. Sagu menjadi komoditas tanaman perkebunan, sebagai pangan lokal bagi masyarakat dan memiliki peluang pengembangan yang strategis (Bintoro, 2010). Namun dalam perkembangannya pengelolaan sagu masih dihadapkan pada permasalahan yang kompleks. Dengan adanya potensi tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan dan mengelola sagu berdasarkan tata kelola pemerintahan inklusif. Adapun rincian potensi sagu tersebut adalah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti 2019

Gambar 1 Potensi Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan gambar di atas potensi sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat perkebunan rakyat dan perkebunan perusahaan. Perkebunan rakyat sendiri memiliki luas sekitar 40.186 ha dan mampu memproduksi sekitar 247.014 ton per tahun. Sedangkan perkebunan perusahaan memiliki luas sekitar 12.736 ha dan mampu memproduksi 12.000 ton per tahun. Sehingga jika ditotalkan luas perkebunan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 52.922 ha atau 43% dari lahan yang tersedia yaitu 123.585 ha. Dan masih ada sekitar 70.663 ha lahan yang belum digarap atau dimanfaatkan.

Pada pengelolaan sagu terdapat beberapa tantangan, seperti diberlakukannya kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terhadap lahan-lahan yang banyak ditumbuhi sagu (Busro, 2018). Kebijakan tersebut diterbitkan sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola

hutan alam primer dan lahan gambut. Instruksi ini bertujuan untuk menyiapkan berbagai usaha penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut (Mindarti, 2016). Upaya ini sedang berlangsung untuk menurunkan emisi akibat penebangan dan penyusutan hutan. Inpres ini terbukti efektif untuk membenahi pengelolaan hutan dan kehutanan Indonesia. Kebijakan tersebut tidak sesuai di Kepulauan Meranti.

Tetapi pemerintah daerah harus patuh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga menyulitkan dalam perluasan perkebunan sagu, tanaman sagu tumbuh dilahan gambut dan rawa-rawa. Jika tidak ditanami sagu, lahan tersebut akan terlantar dan menyebabkan kebakaran hutan. Kemudian dalam pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak ada kebijakan atau peraturan daerah yang mengatur. Potensi sagu berkembang karena adanya budaya dari masyarakat dalam mengelola sagu secara turun-temurun. Karena potensi daerahnya adalah sagu, seharusnya pemerintah daerah membuat aturan mengenai pengelolaan sagu. Sehingga dapat diketahui bagaimana peran dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang terlibat (Sedarmayanti, 2007).

Walaupun demikian, pemerintah tetap berperan dalam pengelolaan sagu. Pemerintah berperan dibagian hulu melalui Dinas Perkebunan dan Hortikultura yaitu menghasilkan produk utama berupa tepung sagu (Rohman, 2018). Dan pengembangan produk hilir nya melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM berupa pengolahan tepung sagu yang telah diproduksi menghasilkan berbagai macam jenis produk turunan sagu (Hery, 2018). Kemudian tindakan inklusif pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan sagu diantaranya ialah mengikutsertakan pihak swasta yaitu PT. Nasional Sagu Prima (NSP) dalam pengelolaan sagu. Serta memberikan kesempatan dan dukungan kepada masyarakat yang ingin terlibat dalam pengelolaan sagu sebagai petani dan pengusaha sagu.

Tantangan selanjutnya adalah masyarakat yang masih terlibat sistem ijon. Sistem ijon ini terjadi pada petani sagu maupun pemilik kilang sagu. Sistem ijon ini sangat merugikan pengusaha sagu, karena keuntungan hasil sagu nya kecil. Tetapi dengan adanya sistem ijon ini mereka terbantu untuk tetap mengelola sagu. Karena dengan usia panen sagu yang lama, dan tidak adanya penyangga ekonomi yang lain. Sehingga memaksa petani sagu untuk meminjam dana ke para toke sagu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan para pengusaha sagu terlibat sistem ijon karena mereka kekurangan informasi pasar. Sehingga terpaksa menjual produk sagunya ke pengepul yang mampu membeli dalam jumlah besar.

Kota Cirebon yang menjadi pasar penampung terbesar sagu Kepulauan Meranti, telah menumpuk sagu sejak puluhan tahun lamanya. Sehingga turun naiknya harga sagu ditentukan oleh para pengepul yang disebut dengan tengkulak atau mafia pasar. Serta mereka juga sudah terikat kontrak. Para pengepul akan membayar terlebih dahulu dan tepung sagu akan dikirim menyusul kemudian. Selain itu, pada proses penjualannya terdapat rantai pedagang perantara. Hal ini menyebabkan lemahnya informasi pasar terkait harga, kualitas, kuantitas dan jenis produk. Para pembeli cenderung mengandalkan informasi dari pedagang perantara. Sehingga pedagang perantara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan keuntungan kilang sagu. Dari

penjelasan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Inclusive Governance* pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti”.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Dengan metode ini penulis dapat melihat tata kelola pemerintahan inklusif pada pengelolaan sagu di Kepulauan Meranti secara mendalam melalui pengumpulan data metode penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan memberikan informasi apa adanya tanpa menambah dan mengurangi fakta yang ada (Sugiyono, 2014). Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisa data pada penelitian ini, penulis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. *Inclusive Governance* pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

Inclusive Governance adalah tatakelola pemerintahan, dimana pemerintah mengikutsertakan pihak lain (Behera, 2021). Dalam hal ini ialah pihak swasta dan masyarakat yang diajak untuk ikut serta dalam pengembangan potensi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sagu. Dengan tujuan untuk membangun dan membuka partisipasi dari banyak pihak (Divakar & Singh, 2022). Dan diharapkan tidak ada pihak atau kelompok yang ditinggalkan atau tereksklusi dalam pola pembangunan dikepulauan meranti. Pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pengelolaan sagu.

Untuk mengetahui *inclusive governance* pada pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti penulis menggunakan unsur *inclusive governance* menurut Amanullah et al., (2015:15). Tata kelola pemerintahan dapat dikatakan inklusif jika didalamnya terdapat tiga unsur penting yang saling mendukung. Menurut Amanullah et al., tiga unsur penting *inclusive governance* tersebut ialah :

- a. Transparansi
- b. Partisipasi
- c. *Equality*

Adanya unsur transparansi dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidaklah cukup untuk konteks daerah yang plural dan multikultural. Karena masih terdapat kelompok rentan dan minoritas yang seringkali tereksklusi dari pola pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, didalam tata kelola pemerintahan inklusif selain unsur transparansi, partisipasi ditambahkan unsur *equality* (kesetaraan). Dimana pihak yang terlibat diberi peran, kepercayaan

dan ruang kolaborasi dalam mengembangkan potensi sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Meski mereka berasal dari latar belakang yang berbeda tetapi saling menghargai dan merangkul perbedaan.

a. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dan pertanggungjawaban mengenai tatakelola pemerintahan oleh pemerintah kepada pihak swasta dan masyarakat (Hasibuan, 2017). Adanya kebebasan setiap orang untuk mengakses informasi mengenai kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sagu. Pemerintah mengakomodasi pihak swasta dan masyarakat sejak perencanaan, implementasi dan evaluasi dalam pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait transparansi oleh pemerintah kepada aktor pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan bahwa pemerintah kurang transparan. Keterbukaan informasi terkait program dan kebijakan yang telah disampaikan pemerintah ternyata berbeda dengan pengakuan yang disampaikan oleh masyarakat. Yaitu para petani sagu dan pemilik usaha sagu, mereka rata-rata mengaku tidak mendapatkan informasi atau arahan serta bantuan dari pemerintah.

Sedangkan pihak swasta yaitu PT. NSP mengakui bahwa pemerintah sudah transparan dengan selalu melibatkan mereka dalam pengelolaan sagu. Walaupun pernah terjadi kesalahpahaman mengenai peraturan yang berlaku. Yang disebabkan karena pemerintah kurang mensosialisasikan peraturan tersebut kepada pihak swasta. Sehingga PT. NSP tidak ada mendapatkan informasi dan menyebabkan penunggakan pembayaran selama bertahun-tahun.

b. Partisipasi

Partisipasi merupakan keikutsertaan dan keterlibatan para aktor dalam pengembangan potensi (Dwiyanto, 2011) sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah kabupaten harus memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sagu. Adapun yang terlibat dalam pengelolaan sagu ialah pihak swasta yaitu PT. NSP. Dan masyarakat yang berperan sebagai petani sagu dan pemilik IKM sagu. Dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak, maka akan meningkatkan berkembangnya potensi sagu.

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait partisipasi dari aktor yang terlibat dalam pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam mengikutsertakan masyarakat dan swasta sudah baik. Dapat dilihat dari bentuk dukungan pemerintah dengan memberikan izin kepada para petani sagu dan pengusaha sagu untuk mengelola sagu. Lalu dilihat dari program kelompok tani sagu yang diperuntukkan untuk petani sagu. Dan dengan

dibangunnya sentra IKM sagu yang dapat membantu para pengusaha sagu. Kemudian hubungan baik yang terjalin antara pemerintah dengan PT. NSP.

Sedangkan tingkat partisipasi dari PT. NSP dan masyarakat sebagai petani sagu dan pengusaha sagu juga sangat bagus. Dapat dilihat dari luasan tanaman sagu sehingga menarik para pengusaha sagu untuk mendirikan IKM sagu seperti kilang sagu dan pengolahan produk turunannya. Sehingga mempengaruhi jumlah IKM sagu semakin meningkat dan tersebar di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan ini pastinya mempengaruhi dalam meningkatnya produktifitas sagu di Kepulauan Meranti. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada yang terlibat sistem ijon, tetapi potensi sagu terus meningkat. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah IKM Sagu dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Jenis Produk		Jumlah Tenaga Kerja
		Hulu	Hilir	
1	Tebing Tinggi	4	67	301
2	Tebing Tinggi Barat	37	7	894
3	Rangsang	4	-	62
4	Rangsang Barat	-	4	7
5	Merbau	13	38	263
6	Tebing Tinggi Timur	22	6	735
7	Pulau Merbau	3	7	60
8	Rangsang Pesisir	4	9	144
9	Tasik Putri Puyu	4	5	95
Jumlah		91	143	2.561

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten Kepulauan Meranti 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah IKM sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 234 unit. Yang terdiri dari IKM sagu yang menghasilkan tepung sagu sebanyak 91 unit dan IKM sagu yang menghasilkan produk turunan sagu sebanyak 143 unit. Dengan jumlah tenaga kerja sekitar 2.561 orang. Itu merupakan IKM sagu yang terdaftar di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebenarnya masih banyak lagi industri yang belum terdaftar. Yang disebabkan karena kurangnya kesadaran pemilik untuk mendaftarkan usahanya.

c. Equality

Equality dapat diartikan sebagai persamaan perlakuan atau adil. Pemerintah dalam memberikan hak pengelolaan sagu kepada aktor yang

terlibat seperti masyarakat dan swasta tidak ada membedakan status. Bagi masyarakat atau swasta yang tertarik untuk terlibat dalam pengelolaan sagu, pemerintah sangat mendukung. Tidak ada membedakan dalam memberikan kesempatan, semuanya setara dan diperlakukan secara adil. Serta mengikutsertakan mereka dalam proses perencanaan pengembangan potensi sagu di Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan terkait persamaan perlakuan (*equality*) dari pemerintah kepada aktor yang terlibat dalam pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah adil. Para petani, pemilik IKM sagu dan PT. NSP mengakui bahwa pemerintah adil dan memberikan perlakuan yang sama. Pemerintah sangat mendukung siapapun yang ingin terlibat dalam pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan jika terdapat hambatan dan maslaah yang dialami para aktor, pemerintah berusaha untuk memberikan solusi.

2. Faktor Penghambat *Inclusive Governance* pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait pelaksanaan *Inclusive Governance* pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditemukan beberapa faktor penghambat *Inclusive Governance* pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

a. Kurangnya Promosi

Yang dimaksud dengan kurangnya promosi dalam penelitian ini adalah dalam memperkenalkan potensi sagu kepulauan meranti, pemerintah kurang melakukan promosi. Sehingga sagu kepulauan meranti diluar tidak mendapatkan nama atau pengakuan. Padahal Kabupaten Kepulauan Meranti penghasil sagu terbesar di Indonesia. Dan ini juga dapat mempengaruhi investor untuk menginvestasikan dananya di Kepulauan Meranti. Karena pemerintah kurang promosi sehingga sulit untuk menarik investor.

Dari hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa pemerintah kurang promosi. Dalam hal ini pemerintah kurang mempromosikan potensi sagu dengan didukungnya ketersediaan lahan yang luas di Kepulauan Meranti. Sehingga menyebabkan kurangnya investor di Kepulauan Meranti. Kemudian kurangnya promosi budaya konsumsi sagu. Padahal sagu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang sehat. Hal ini bisa dimulai dari daerahnya sendiri, kemudian akan menyebar kedaerah lain.

b. Kesadaran Masyarakat

Maksud dari kesadaran masyarakat dalam penelitian ini ialah masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti kurang kesadaran dalam

membudayakan sagu sebagai bahan pangan pengganti beras. Sebagai daerah penghasil sagu, seharusnya hal ini sudah membudaya dimasyarakat untuk mengkonsumsi sagu. Jika masyarakat Kepulauan Meranti sendiri sudah memiliki budaya konsumsi sagu, pasti akan cepat menyebar ke daerah lain. Sehingga sagu kepulauan meranti lebih dikenal dan meningkatkan permintaan pasar. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya promosi dari pemerintah daerah untuk membudayakan konsumsi sagu.

Dari hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat ini terdiri dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi sagu. Budaya konsumsi sagu sudah mulai luntur, dan hal ini juga disebabkan oleh kurangnya promosi dari pemerintah daerah. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat untuk terlepas dari sistem ijon. Karena sistem ijon ini sangat merugikan pengusaha sagu itu sendiri, dan hanya bisa diatasi oleh kesadaran nya sendiri bahwa hal tersebut merugikan.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa diatas mengenai *Inclusive Governance* pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan faktor penghambat *Inclusive Governance* pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya *Inclusive Governance* pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan konsep yang digunakan masih ada indikator yang belum terlaksana dengan baik. Diantara indikator transparansi, partisipasi dan *equality*, indikator transparansi belum maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya keterbukaan dari pemerintah kepada PT. NSP dan masyarakat.

Kemudian terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan *Inclusive Governance* pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu kurangnya promosi dari pemerintah mengenai potensi sagu kepulauan meranti. Sehingga sagu meranti kurang terkenal dan kurang menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya pada pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mulai mengkonsumsi sagu sebagai bahan pangan pengganti beras dan kurangnya kesadaran petani dan pengusaha sagu untuk mulai meninggalkan sistem ijon.

Referensi

- Amanullah, N. dkk. 2015. Tatakelola Pemerintahan Inklusif dan Inisiatif Lokal. Depok: Abdurrahman Wahid Centre.
- Behera, M. 2021. Desentralisasi, pembangunan inklusif dan Tata kelola pemerintahan yang baik. *World Bulletin of Social Sciences (WBSS)*. Vol. 2, 47-55.
- Bintoro, M.H. dkk. 2010. Sagu di Lahan Gambut. Bogor: IPB Press.

- Busro, M. 2018. Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama). Jakarta: Prenamedia Group
- Divakar, M. Singh, M. 2022. Tata Kelola Inklusif untuk Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus Kudumbashree, Kerala. *Journal of Positive School Psychology*. 6(4), 11587 – 1159.
- Dwiyanto, A. 2011. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusi, dan Kolaboratif (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, M. 2017. Manajemen Sumberdaya Manusia, Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hery. 2018. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT. Grasindo
- Maftuhin, A. 2017. Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-usul, Teori dan Indikator. *Tata Loka*. 19(2), 93-103.
- Mindarti, L.I. 2016. Konsep Governance: Dalam Perspektif Pendekatan Historis, Teoritis, dan Empiris. Malang: UB Press.
- Rohman, A. 2018. Dasar-dasar Manajemen Publik. Malang: Empat Dua
- Sedarmayanti. 2007. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta